

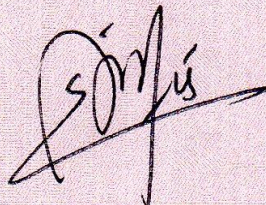
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul :Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Melalui Kerjasama KPU Kota Padang dengan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang
Nama : Hariyanti
TM/NIM : 2011/1101765
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 8 Januari 2015

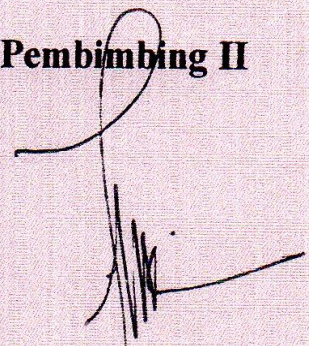
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. Al Rafni, M.Si
NIP. 19680212 199303 2 001

Pembimbing II



Dr. Fatmariza, M.Hum
NIP. 19660304 199103 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

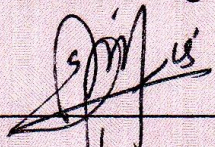




Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis, 8 Januari 2015 Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Melalui Kerjasama KPU Kota Padang dengan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang

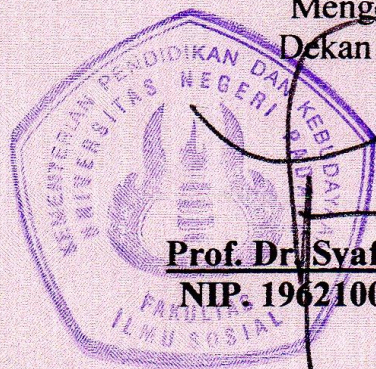
Nama : Hariyanti
TM/NIM : 2011/1101765
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 8 Januari 2015

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Al Rafni, M.Si	
Sekretaris	: Dr.Fatmariza, M.Hum	
Anggota	: Drs. Suryanef, M.Si	
Anggota	: Prof.Dr.Azwar Ananda, MA	
Anggota	: Junaidi Indrawadi, S.Pd, M.Pd	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Hariyanti :Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Melalui Kerjasama
KPU Kota Padang dengan MGMP PKn SMA/MA
Kota Padang.

Pendidikan pemilih dilakukan oleh KPU Kota Padang kerjasama dengan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang berbentuk kegiatan kelas pemilu dengan kelompok sasaran peserta didik sebagai pemilih pemula. Kelas Pemilu adalah kegiatan belajar mengajar materi kepemiluan dengan menggunakan metode *BRIDGE*. Terdapat kelemahan dari kegiatan kelas pemilu yakni kelas pemilu tidak dilaksanakan di seluruh sekolah menengah di Kota Padang serta hanya dilaksanakan satu kali di sekolah sasaran.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif. Lokasi Penelitian adalah SMAN 9 Padang dan SMAN 5 Padang yang terletak di Korwil Pauh-Kuranji.

Hasil Penelitian menunjukkan kelas pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahap yakni tahap perencanaan yang meliputi pembuatan modul, workshop dan sosialisasi modul kelas pemilu hingga penandatanganan *MoU* dengan pemerintah Kota Padang. Tahap Pelaksanaan meliputi kegiatan Kelas pemilu di sekolah sasaran, serta Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut, yang meliputi evaluasi internal di KPU Kota Padang yang berujung pada keputusan program kelas pemilu tidak dilanjutkan pada tahun 2013. Dalam pelaksanaan kelas pemilu, terdapat beberapa kendala yakni waktu pelaksanaan kelas pemilu yang relative sempit dan modul kelas pemilu tidak bisa diterapkan di sekolah yang tidak menjadi sekolah sasaran. Oleh sebab itu, sebaiknya ke depan, kelas pemilu dilaksanakan dengan mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran PKn.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang masih memberikan rahmat iman, islam beserta kesehatan kepada kita. Selanjutnya, shalawat beserta salam untuk junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti yang tengah dirasakan pada saat sekarang ini.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Melalui Kerjasama KPU Kota Padang dengan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang” merupakan salah satu persyaratan akademis untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa kepenulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta semangat dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, izinkanlah penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Drs. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D selaku ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, Ibu Henni Muchtar, SH., M.Hum selaku sekretaris

Jurusan Ilmu Sosial Politik,

3. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai pembimbing II Penulis.
4. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si, selaku pembimbing I Penulis yang telah memberikan waktu dan saran serta dorongan semangat dalam proses penyusunan Skripsi ini sekaligus juga merupakan Pembimbing Akademik Penulis.
5. Bapak (Alm) Drs.Muhardi Hasan, M.Pd, selaku pembimbing II Penulis. Dalam semasa hidupnya, beliau (Alm) telah memberikan waktu, saran serta dorongan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah dilakukan oleh Alm. dapat dibalas dengan pahala yang berlimpah oleh Allah SWT.
6. Bapak Drs.Suryanef, M.Si, Bapak Professor Dr. Azwar Ananda, MA Bapak Junaidi Indrawadi S.Pd M.Pd, masing-masing selaku Penguji I, Penguji II, Penguji III Penulis, yang telah memberikan kritikan dan saran kepada penulis demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Ayah Hasan Basri dan Ibunda Nurhayati, yang telah memberikan limpahan do'a serta dorongan semangat yang tiada hentinya kepada penulis.
8. Para Informan dalam Penelitian skripsi ini baik dari KPU Kota Padang, MGMP PKn SMA/MA Kota Padang, dan SMAN 9 Padang

serta SMAN 5 Padang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian skripsi penulis.

9. Teman-Teman Seangkatan Penulis PPKn 2011 yang telah memberikan semangat kepada penulis baik semasa kuliah maupun dalam proses penyusunan Skripsi.
10. Teman-teman PLK di SMP N 30 Padang yang telah banyak membantu memberikan saran dan semangat kepada penulis
11. Seterusnya kepada berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung selama masa menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Padang, Desember 2014

Hormat Penulis,

Hariyanti

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pendidikan Pemilih.....	11
B. Bentuk Pelaksanaan Pendidikan Pemilih	15
C. Dasar Hukum Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Pemilih ..	19
D. Kerangka Konseptual	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Informan	24

D.	Jenis dan Sumber Data	25
E.	Teknik Pengumpulan Data	26
F.	Teknik Analisis Data	27
G.	Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A.	Temuan Umum	30
B.	Temuan Khusus	37
1.	Pelaksanaan Kelas Pemilu sebagai Bentuk Pendidikan Pemilih Oleh KPU Kota Padang Kerjasama dengan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang.....	37
a.	Tahap Perencanaan Kelas Pemilu	37
b.	Tahap Pelaksanaan Kelas Pemilu.....	49
c.	Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut Kelas Pemilu	68
2.	Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Kelas Pemilu.....	75
3.	Upaya-upaya yang dapat Dilakukan dalam Pelaksanaan Kelas Pemilu agar lebih Efektif dalam Pencapaian Tujuan	78
C.	Pembahasan.....	85
1.	Pelaksanaan Kelas Pemilu sebagai Bentuk Pendidikan Pemilih Oleh KPU Kota Padang Kerjasama dengan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang	85
a.	Tahap Perencanaan Kelas Pemilu	85

b. Tahap Pelaksanaan Kelas Pemilu	90
c. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut Kelas Pemilu	103
2. Kendala Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Kelas Pemilu.....	106
3. Upaya-upaya yang dapat Dilakukan dalam Pelaksanaan Kelas Pemilu agar lebih Efektif dalam Pencapaian Tujuan.....	112

BAB V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan	121
B. Saran	122

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Jumlah Guru di SMA N 9 Padang	34
Tabel 2:	Jumlah Karyawan di SMA N 9 Padang	34
Tabel 3:	Data Siswa SMA N 9 Padang	34
Tabel 4:	Jumlah Guru di SMA N 5 Padang	36
Tabel 5:	Jumlah Karyawan di SMA N 5 Padang	36
Tabel 6:	Data Siswa SMA N 5 Padang	36
Tabel 7:	Tabel guru-guru PKn peserta Workshop Modul Kelas Pemilu .	45
Tabel 8:	Korwil Kelas Pemilu.....	50
Tabel 9:	Daftar Sekolah Sasaran Kelas Pemilu.....	50
Tabel 10:	Jumlah Peserta Didik Kelas XI SMA N 9 Padang Tahun Ajaran 2012/2013.	91

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Konseptual	22
------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Informan	124
Lampiran 2: Gambar Pelaksanaan Kelas Pemilu	125
Lampiran 3: Pedoman Wawancara	128
Lampiran 4: Surat Izin Observasi dari Fakultas Ilmu Sosial	
Lampiran 5: Surat Izin Observasi dari Kesbangpol Kota Padang.	
Lampiran 6: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial	
Lampiran 7: Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kota Padang	
Lampiran 8: Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Padang	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat. Hal tersebut secara eksplisit tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan menentukan corak pemerintahan serta apa yang hendak dicapai (M.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,1983:328). Sebagai bentuk implementasi dari sistem tersebut, maka para penyelenggara negara dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat sehingga mencerminkan suara dan kehendak rakyat.

Pemilihan umum merupakan persyaratan inti sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat (Miriam Budiardjo,2013:461). Namun, dalam kenyataannya terdapat pemilihan umum dengan tingkat partisipasi politik yang rendah. Dengan kata lain, relative banyak warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya atau dikenal dengan istilah golongan putih (golput) maupun menggunakan hak pilih namun hanya untuk sekedar menjalankan hak tersebut tanpa benar-benar memahami pentingnya pemilihan umum. Terhadap permasalahan ini, salah satunya dapat dikurangi melalui pendidikan pemilih.

Menurut Nur Budi Hariyanto (2012:144) Pendidikan pemilih berisikan tentang pemahaman prosedur pemilihan untuk warga negara yang telah berhak

memilih. Dari pendidikan ini diharapkan pemilih pemula berpartisipasi dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih. Tidak hanya itu, mereka diharapkan ikut mengawasi jalannya pemilu, setidaknya penyelenggaraan yang harus sesuai dengan prosedur yang benar.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana bagi pelaksanaan pendidikan pemilih di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik untuk menjadi warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara yang harus digunakan secara cerdas agar dapat menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan pemimpin yang tepat. Dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan (PKn) SMA/MA, materi mengenai pemilihan umum dan demokrasi dipelajari di kelas XI. Di dalam materi tersebut termuat mengenai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum, pengertian pemilihan umum, sistem pemilihan umum, peserta pemilihan umum, hingga hubungan antara pemilihan umum dan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik khususnya bagi yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih untuk dapat menyalurkan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah (MGMP PKn SMA/MA) merupakan perkumpulan dari guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan tingkat sekolah menengah di Kota Padang. MGMP PKn dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sehubungan dengan

pengembangan dan pendalaman materi Pendidikan Kewarganegaraan. Contohnya, kerjasama antara MGMP PKn dengan KPU Kota Padang dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih terhadap peserta didik. Kerjasama ini dilakukan mengingat penyampaian materi pemilihan umum merupakan bagian integral dari Pendidikan Kewarganegaraan. (SumbarOnline.Com/Senin, 22 Oktober 2012 - 17:59:44 WIB). Kerjasama pendidikan pemilih dilakukan menjelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.

Pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang didasarkan atas pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum. Pendidikan pemilih dilakukan guna menyampaikan dan membahas materi seputar pemilihan umum seperti dasar hukum pemilihan umum, sejarah kepemiluan, arti penting pemilihan umum, proses dan tahapan pemilihan umum hingga teknis pemungutan suara dan penghitungan suara yang diakhiri dengan simulasi.

Pendidikan pemilih bertujuan untuk mendorong para peserta didik yang telah memiliki hak pilih untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum berdasar kepada pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki sehingga mereka tidak lagi menjadi objek yang hanya diinginkan suaranya tanpa didengarkan aspirasinya tetapi mereka dapat dilihat sebagai subjek yang memahami peranan pemilihan umum dalam penyelenggaraan negara serta proses dan teknis pemilihan umum. Jadi, pendidikan pemilih tidak hanya mendorong peserta didik memberikan hak pilihnya di TPS.

Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang dan MGMP PKN dilakukan di 5 korwil yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang yakni korwil Padang Barat-Padang Utara, korwil Koto Tangah-Nanggalo, korwil Pauh-Kuranji, korwil Lubuk Begalung-Lubuk Kilangan, korwil Padang Timur-Padang Selatan-Bungus Teluk Kabung. Masing-masing korwil berada di bawah tanggung jawab seorang Komisioner KPU Kota Padang. Pendidikan pemilih yang dilakukan berbentuk kegiatan kelas pemilu yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2012. Kelas Pemilu adalah kegiatan belajar mengajar materi kepemiluan dengan menggunakan metode *BRIDGE* yakni sebuah metode pembelajaran orang dewasa yang partisipatif dengan mengedepankan contoh-contoh praktis seputar pemilihan umum sehingga pemahaman peserta didik akan pentingnya pemilihan umum dapat lebih maksimal.

Namun dalam pelaksanaannya, berdasarkan observasi awal tanggal 23 Mei 2013, terdapat beberapa kelemahan dari kegiatan kelas pemilu. *Pertama*, kegiatan kelas pemilu tidak dilaksanakan di seluruh sekolah menengah di Kota Padang. Kegiatan kelas pemilu hanya dilaksanakan di 11 sekolah menengah Kota Padang. Jumlah sekolah tersebut mewakili 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Kesebelas sekolah tersebut adalah SMA N 1 PADANG (Padang Utara), SMA N 2 PADANG (Padang Barat), SMA N 7 PADANG (Koto Tangah), SMA 12 PADANG (Nanggalo), SMA N 9 PADANG (Pauh), SMA N 5 PADANG (Kuranji), SMA 10 PADANG (Padang Timur), SMA N 6 PADANG (Padang Selatan), SMA N 11 PADANG (Bungus Teluk Kabung), SMA SEMEN PADANG (Lubuk Kilangan), SMA N 4 PADANG (Lubuk Begalung).

Kedua, ketiadaan laporan dari guru-guru PKN yang melaksanakan sendiri kegiatan kelas pemilu karena sekolahnya tidak didatangi secara langsung oleh KPU Kota Padang, sehingga tidak dapat diketahui apakah guru-guru PKN tersebut mengajarkan dan menerapkan modul kelas pemilu tersebut atau tidak seperti halnya yang dijelaskan oleh Ketua KPU Kota Padang Bapak Alison S.Pt,

“Sampai saat ini, tidak ada laporan dari guru-guru MGMP PKN tentang pelaksanaan kelas pemilu dan KPU pun tidak melakukan survey terhadap kegiatan tersebut di sekolah”
(observasi tanggal 23 Mei 2014).

Jadi, tidak terdapat evaluasi dari pelaksanaan kegiatan kelas pemilu dari sekolah-sekolah yang tidak didatangi secara langsung oleh KPU Kota Padang. Evaluasi penting dilakukan karena dapat menjadi pedoman untuk perbaikan kegiatan kedepannya. *Ketiga*, kegiatan kelas pemilu hanya dilaksanakan satu kali dan tidak terdapat kegiatan tindak lanjut setelah itu. Kelas pemilu dilaksanakan pada akhir tahun 2012 menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2013 (Pilkada) padahal setelah Pilkada tersebut, juga akan dilaksanakan pemilihan umum anggota legislatif pada April 2014 dan pemilihan Presiden pada Juli 2014.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil Korwil Pauh-Kuranji sebagai lokasi penelitian terkait dengan Pelaksanaan kelas pemilu. Pada korwil Pauh-Kuranji terdapat 2(dua) sekolah yang ditentukan oleh KPU Kota Padang sebagai sekolah sasaran kegiatan kelas pemilu, yakni SMA N 9 Padang mewakili sekolah menengah di kecamatan Pauh dan SMA N 5 Padang mewakili sekolah menengah di Kecamatan Kuranji.

Terdapat beberapa alasan dalam penentuan korwil Pauh-Kuranji sebagai lokasi penelitian: *Pertama*, jumlah pemilih pemula. Peserta didik yang mempunyai hak pilih di kedua sekolah ini cukup besar, di SMA N 9 Padang terdapat sekitar 300 peserta didik sedangkan di SMA N 5 Padang terdapat sekitar 325 peserta didik. *Kedua*, angka golput di kecamatan Pauh dan Kuranji terhitung cukup tinggi. Di Kecamatan Pauh, terdapat 37.544 orang yang terdaftar di DPT, namun sekitar 15.398 orang diantaranya tidak menggunakan hak pilih alias golput. Sedangkan di Kecamatan Kuranji, dari total 87.421 orang yang terdaftar di DPT, sekitar 36.927 orang tidak menggunakan hak pilih. Memungkinkan dari 15.000 orang lebih yang tidak memilih di Kecamatan Pauh dan 36.927 orang yang juga tidak menggunakan hak pilih di Kecamatan Kuranji terdapat diantaranya para peserta didik yang merupakan pemilih pemula. *Ketiga*, status sekolah, SMA N 9 Padang dan SMA N 5 Padang merupakan sekolah unggulan di masing-masing kecamatan sehingga peserta didik yang menuntut ilmu di sekolah tersebut adalah peserta didik yang cerdas dan kritis sehingga mereka memiliki kepedulian terhadap informasi kepemiluan yang telah diberikan serta kesadaran untuk melaksanakannya.

Pendidikan pemilih *urgent* diberikan kepada pemilih pemula karena ketiadaan pengalaman dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga mereka rentan untuk tidak menggunakan hak pilih dan memiliki kesadaran yang relatif rendah mengenai makna dan peranan strategis pemilihan umum di dalam negara Indonesia. Menurut Wakil Ketua MPR RI Hajrianto Thohari bahwa tren keikutsertaan pemilih pemula cenderung menurun dalam 3(tiga) pemilihan umum

terakhir yakni Pemilu Legislatif Tahun 2004, Pemilu Legislatif Tahun 2009, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Kecenderungan ini membuktikan gagalnya pendidikan politik khususnya pendidikan pemilih. Terkait dengan hal itu, terdapat empat pihak yang harus bertanggung jawab untuk mengurangi kecenderungan ini sekaligus memperbaiki keadaan. Salah satu pihak tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU harus lebih giat melakukan sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula dengan metodologi yang menarik (JurnalParlemen.com/23 Desember 2013).

Pendidikan pemilih berbentuk kegiatan kelas pemilu yang menggunakan metode *BRIDGE* merupakan bagian dari metodologi yang digunakan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula khususnya pemilih pemula pelajar. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan **“Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Melalui Kerjasama KPU Kota Padang dengan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan kelas pemilu sebagai bentuk pendidikan pemilih oleh KPU Kota Padang melalui kerjasama dengan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang belum mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Pemahaman pemilih yang masih rendah mengenai makna pemilihan umum
3. Adanya kendala-kendala yang ditemui oleh KPU Kota Padang dan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang dalam implementasi pendidikan pemilih.

4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dan MGMP PKn dalam pelaksanaan pendidikan pemilih belum efektif dalam pencapaian tujuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan kelas pemilu sebagai bentuk pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Padang kerjasama dengan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang?
2. Bagaimana kendala-kendala yang ditemui oleh KPU Kota Padang dan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang dalam pelaksanaan pendidikan pemilih?
3. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan oleh KPU Kota Padang dan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang dalam pelaksanaan pendidikan pemilih agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kelas pemilu sebagai bentuk Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Padang kerjasama dengan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang.

2. Untuk menggambarkan kendala-kendala yang ditemui oleh KPU Kota Padang dan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang dalam pelaksanaan pendidikan pemilih.
3. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh KPU Kota Padang dan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang dalam pelaksanaan pendidikan pemilih agar lebih efektif dalam pencapaian tu

E. Manfaat Penelitian.

1. Secara Teoritis.

Untuk mengembangkan bidang ilmu yang terkait dengan penelitian ini seperti ilmu politik, hukum tata negara dimana ilmu-ilmu tersebut mengkaji mengenai pemilihan umum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem politik demokrasi. Selain itu, juga untuk pengembangan materi pendidikan kewarganegaraan terkait dengan materi pemilihan umum dan demokrasi.

2. Secara Praktis

a. KPU Kota Padang

Untuk memberikan masukan-masukan kepada KPU guna membantu memecahkan masalah terkait dengan kurangnya kesadaran dan partisipasi pemilih pemula pelajar dalam pelaksanaan proses pemilihan umum.

b. Sekolah.

Untuk memberikan masukan-masukan kepada pihak sekolah guna menyediakan waktu dan tempat terkait dengan pelaksanaan pendidikan

pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap peserta didik.

c. Guru Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk memberikan masukan-masukan kepada guru pendidikan kewarganegaraan tingkat sekolah menengah agar berperan aktif dalam organisasi MGMP PKn karena bermanfaat dalam meningkatkan profesionalitas guru PKn terkait dengan pendalaman materi PKn serta juga dapat menyukseskan program-program kerjasama MGMP PKn dengan pihak lain dalam hal ini KPU Kota Padang.

d. Peserta didik.

Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik sebagai pemilih pemula pelajar tentang makna dan pentingnya pemilihan umum sehingga akan tumbuh kesadaran untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan kegiatan kelas pemilu terdiri dari beberapa tahapan: *pertama*, tahap perencanaan yang meliputi pembuatan modul, workshop dan sosialisasi modul kelas pemilu hingga penandatanganan *MoU* dengan pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan Kota Padang. *Kedua*, tahap Pelaksanaan meliputi kegiatan Kelas pemilu di sekolah sasaran, materi-materi pemilihan umum yang diberikan hingga metode yang digunakan serta; *Ketiga*, tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut. Kelas pemilu tidak dilanjutkan pada tahun 2013 karena padatnya kegiatan KPU Kota Padang terkait dengan persiapan pemilihan walikota dan wakil walikota padang tahun 2013 dan pemilihan legislative tahun 2014 padahal kelas pemilu cukup efektif dan menarik dalam memberikan informasi pemilihan umum kepada pemilih pemula yang masih duduk di bangku sekolah menengah.
2. Adanya beberapa kendala yang ditemui di lapangan dalam kegiatan kelas pemilu, yakni (1) waktu pelaksanaan kelas pemilu yang relative sempit di sekolah sasaran sehingga materi pemilihan umum tidak dapat disampaikan secara lengkap dan menyeluruh sebagaimana yang telah direncanakan dalam modul kelas pemilu untuk pemilih pemula; (2) Penentuan peserta pemilihan umum yang tidak menggunakan sistem perwakilan kelas seperti yang terjadi

- di SMA N 9 Padang sebagai sekolah lokasi penelitian; (3) Modul kelas pemilu relative tidak dapat diterapkan di luar sekolah sasaran kelas pemilu.
3. KPU Kota Padang dan MGMP PKn SMA/MA Kota Padang menginginkan agar kedepan pelaksanaan kelas pemilu diintegrasikan ke dalam silabus mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sehingga penyampaian materi kelas pemilu tidak membutuhkan jam khusus dan tidak mengganggu pokok bahasan materi lain serta waktu penyampaian materi menjadi lebih panjang.

B. Saran.

1. Kelas pemilu sebaiknya dilanjutkan karena kegiatan pendidikan pemilih bukanlah program yang hanya dapat dilakukan menjelang digelarnya hajjat Pemilihan Umum baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tetap pelaksanaan pendidikan pemilih lebih kepada pola kegiatan yang *continue* atau berkesinambungan dari waktu ke waktu.
2. Materi kelas pemilu sebaiknya dapat diintegrasikan dalam silabus mata pelajaran PKn melalui materi-materi yang terkait dengan pemilihan umum. Artinya, tidak dibutuhkan jam khusus di luar Proses Belajar Mengajar (PBM) untuk melaksanakan kegiatan kelas pemilu. Hal ini dilakukan karena kegiatan kelas pemilu seperti yang sudah dilakukan sebelumnya dianggap tidak efektif sebab tidak semua peserta didik mendapatkan informasi pemilihan umum secara karena menggunakan sistem perwakilan kelas dan dapat mengganggu

proses belajar mengajar karena mengambil jam pelajaran PKn selama satu kali pertemuan.

3. Diperlukan kerjasama dan kemauan yang kuat dari pihak-pihak terkait seperti KPU Kota Padang, MGMP PKn sekolah menengah Kota Padang serta pihak sekolah agar upaya-upaya ke depan yang ditawarkan untuk keefektifan pelaksanaan kelas pemilu dapat diwujudkan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik sebagai pemilih pemula mengenai pemilih umum.

Daftar Pustaka

Acuan dari Buku.

Andi Faisal Bakti, dkk.,Eds. 2012. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*.

Churia:Jakarta.

Hafied Cangara. 2013. *Komunikasi Politik*. Rajawali Press: Jakarta.

Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayana. 2010. *Cerdas, Kritis, Dan Aktif*

Berwarganegara. Erlangga:Jakarta.

Janedjri M. Gaffar. 2013. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah*

Konstitusi. Konstitusi Press:Jakarta.

Kartini Kartono. 2009. *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian dari Pendidikan*

Orang Dewasa. Cv Mandar Maju: Bandung.

Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT

Remaja Rosdakarya: Bandung.

Miriam Budiardjo. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka: Jakarta.

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara*

Indonesia, cet. Kelima. UI Press:Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum. 2010. *Modul 1: pemilu untuk pemula*, cet. Pertama.

Komisi Pemilihan Umum: Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. 2012. *Modul Kelas Pemilu*.

Sugiyono. 2013. *Penelitian Kombinasi*. Alfabeta: Jakarta.